

## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN PERKAPITA, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BALI TAHUN 2006 - 2011**

**I Made Anom Iswara  
I Gusti Bagus Indrajaya**

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2006 - 2011. Penelitian ini menggunakan riset kuantitatif yaitu dengan melihat laporan pendapatan asli daerah, laporan pendapatan perkapita, tingkat pendidikan masyarakat dan jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Ditemukan hasil bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Serta, pendapatan asli daerah, pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

**Kata Kunci** : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kemiskinan

### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the effect of regional income, per capita income, and level of education on the level of poverty in the province of Bali in 2006-2011. This study used a quantitative research by looking at reports revenue, earnings per capita, the level of public education and the amount of poverty in the province of Bali. This research was conducted in the province of Bali. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression. It was found that the level of education has a negative and significant impact on poverty levels. The results further showed that revenue and income per capita in partial no effect on the level of poverty. And then, local revenues, per capita income, and education level simultaneously significant effect on the level of poverty.

**Keywords** : Regional Income, Per Capita Income, Education Level, Level Poverty

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks bagi negara maju maupun negara berkembang, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan (Vincent, 2009). Menurut Nilsen (2007) kemiskinan akan membatasi kemampuan individu untuk tetap sehat dan mengembangkan keterampilannya. Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang sulit untuk dicari solusinya. Menurut BPS Provinsi Bali tahun 2012, penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu, (1) karena kualitas penduduk yang rendah, (2) karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan (3) karena adanya perbedaan akses dalam modal (Kuncoro, 2004).

Kemiskinan merupakan penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi (Addison, 2007). Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat (M. Muh Nasir *et al.*, 2008). Kemiskinan yang dihadapi oleh penduduk miskin telah menjadi perhatian dunia dan menjadi isu sentral dalam Millenium Development Goal (MDGs). Negara peserta konferensi ini dituntut untuk dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan mengatasi kekurangan pangan hingga 50 persen pada tahun 2015 sehingga tujuan pembangunan nasional tercapai (Yogi dan Jember,

2010). Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan (Budi Santosa dan Puji Rahayu, 2005). Salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia (Prastyo, 2010).

Chriswardani (2005) menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga meliputi tingkat kesehatan, tingkat pendidikan serta ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Menurut Tadaro (2000), kemiskinan ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita dan lebarnya kesenjangan distribusi pendapatan. Penduduk miskin dalam hal ini pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian.

Provinsi Bali yang terkenal dengan destinasi pariwisatanya juga tidak luput dari permasalahan kemiskinan penduduk (Bali dalam Angka, 2013;419). Permasalahan kemiskinan di Provinsi Bali ini ditunjukkan dari masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Bali yang ditunjukkan pada Tabel 1

**Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota tahun 2006-2011 ( Persen )**

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jembrana	10,5	9,9	8,0	6,8	8,1	6,6
Tabanan	7,8	7,5	6,9	5,0	7,0	5,6
Badung	4,6	4,3	3,3	3,3	3,2	2,6
Gianyar	6,3	6,0	6,6	5,8	6,7	5,4
Klungkung	9,5	9,1	7,0	5,2	7,6	6,1
Bangli	7,9	7,5	6,1	5,2	6,4	5,2
Karangasem	9,4	9,0	7,7	6,4	8,0	6,4
Buleleng	9,2	8,7	7,5	6,0	7,4	5,9
Denpasar	2,7	2,1	2,2	2,2	2,2	1,8
<b>BALI</b>	<b>7,5</b>	<b>7,1</b>	<b>6,1</b>	<b>5,1</b>	<b>6,3</b>	<b>5,1</b>

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2012

Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Tingginya rata-rata jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2006 disebabkan karena terjadinya tragedi Bom Bali II pada tahun 2005. Kondisi ini menyebabkan turunnya kunjungan wisatawan dan menjadikan banyaknya tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (Setiyawati dan Ardi Hamzah, 2007). Untuk mengatasi keadaan pasca Bom Bali, pemerintah dituntut untuk mendapatkan berbagai solusi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Jalles (2011) peningkatan pendapatan agregat suatu daerah memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

Ikeji (2011) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di sebuah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memajukan pembangunan sosial ekonomi bagi penduduk setempat (Akudugu, 2012). Menurut Cooray (2009) pemerintah daerah harus dapat memiliki tata pemerintahan yang baik agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada (Kuncoro, 2004). Serupa dengan Kuncoro (2004), hasil penelitian yang dilakukan Lin dan Lin (2000) menunjukkan pemeberian otonomi daerah memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Abdul Halim (2007) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Menurut Ping dan Bai (2005) pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan barang publik yang mendasar seperti pendidikan, kesehatan, perawatan medis, dan lain-lain. Baik buruknya pengelolaan keuangan daerah akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah.

Menurut Kuncoro (2004), pendapatan perkapita merupakan indikator untuk melihat daya beli suatu daerah. Pendapatan perkapita dapat diartikan sebagai jumlah dari nilai suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu (Bibi, 2006). Biasanya pendapatan perkapita sering digunakan sebagai pembandingan tingkat kemakmuran di berbagai daerah (Norton, 2002). Pendapatan perkapita dapat diperoleh dari tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut (Sadono Sukirno, 2004:423).

Banyak yang beranggapan bahwa bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas akan lebih mampu bersaing dalam memasarkan barang dan jasa yang dihasilkan (Bali dalam Angka, 2013;103). Dalam kaitan ini, salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan sumber daya manusia adalah pendidikan. Negara yang memiliki tingkat pendidikan rendah berpotensi kurang mampu menunjukkan ekonomi pembangunan yang berkelanjutan (Eric, 2001). Hal itu menunjukkan bidang pendidikan harus ditingkatkan karena dapat meningkatkan *human capital* dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Dao, 2012).

Serupa dengan pendapatan perkapita tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Menurut Mankiw (2003), modal manusia adalah pendidikan dan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan, mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan, sedangkan Sadono Sukirno (2004) mengatakan bahwa individu yang memperoleh pendidikan yang tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan tidak berpendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

Indikator pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata lama sekolah. Pendidikan merupakan pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa, sebab pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Selain indikator rata-rata lama sekolah, indikator lain untuk mengukur pendidikan adalah dengan menggunakan angka melek huruf. Wongdesmiwati (2009) menyatakan bahwa peningkatan jumlah dan kualitas SDM akan menurunkan tingkat kemiskinan. Peningkatan kemampuan tidak langsung akan berpengaruh terhadap meningkatnya utilitas sehingga meningkatkan pendapatan (Todaro, 2000).

Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak luput dari masalah kemiskinan ini. Oleh sebab itu peneliti melakukan kajian yang mendalam mengenai tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dengan melakukan analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),

pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan pada masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh PAD, pendapatan perkapita, dan pendidikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2006 - 2011.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh PAD, pendapatan perkapita, dan pendidikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2006 - 2011.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali yang merupakan salah satu kepulauan yang ada di Negara Republik Indonesia. Objek dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan perkapita dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Data yang digunakan berupa data *time series* pada tahun 2006 - 2011.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari Badan Pusat Statistik yang diperoleh dari publikasi laporan-laporan tahunan di Provinsi Bali pada periode 2006 – 2011. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum tingkat kemiskinan dan yang mempengaruhinya dan data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang berada di Provinsi Bali yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis regresi linear berganda. Penelitian ini diuji dengan menggunakan uji simultan (F-test) dan uji parsial (t-test) untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Adapun persamaan dari regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu_i \dots \dots \dots (1)$$

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis linier berganda digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan di Provinsi Bali. Adapun hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \hat{Y} &= 14,923 - 0,002X_1 + 0,002X_2 - 1,100X_3 \\ \text{Se} &= (1,194) \quad (0,001) \quad (0,158) \quad (0,186) \\ t &= (12,493) \quad (-1,590) \quad (0,015) \quad (-5,930) \\ \text{Sig} &= (0,000) \quad (0,118) \quad (0,988) \quad (0,000) \\ R &= 0,645 \qquad \qquad \qquad F = 30,307 \end{aligned}$$

Keterangan :

- $\hat{Y}$  = Tingkat Kemiskinan (persen)  
 $X_1$  = Pendapatan Asli Daerah (rupiah)  
 $X_2$  = Pendapatan Perkapita (rupiah)  
 $X_3$  = Tingkat Pendidikan (tahun)

Hasil pengujian diketahui bahwa F hitung model regresi sebesar 30,307. Oleh karena F hitung lebih besar dari F tabel = 2,79 maka dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah, pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan secara serempak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Nilai  $R^2 = 0,645$  memiliki arti bahwa 64,5 persen tingkat kemiskinan di Provinsi Bali (Y) dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah ( $X_1$ ), pendapatan perkapita ( $X_2$ ) dan tingkat pendidikan ( $X_3$ ). Sedangkan sisanya 35,5 persen dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian.

Dari hasil pengujian diketahui bahwa pendapatan asli daerah memiliki nilai t hitung sebesar -1,590. Angka tersebut menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, dimana t hitung lebih kecil daripada -t tabel = -1,675.

Hasil pengujian diketahui bahwa pendapatan perkapita memiliki nilai t hitung sebesar 0,15. Angka tersebut menjelaskan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, dimana t hitung lebih kecil daripada t tabel = 1,675.

Hasil pengujian diketahui bahwa tingkat pendidikan memiliki nilai t hitung sebesar -5,930. Angka tersebut menjelaskan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, dimana t hitung lebih kecil daripada -t tabel = -1,675.

## 2) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas terhadap residual yang dilakukan dalam penelitian ini memperoleh hasil temuan bahwa variabel – variabel penelitian telah memenuhi syarat normalitas setelah diuji dengan program SPSS *for Windows*. Tabel 2 ini menunjukkan bahwa residual model terdistribusi normal. Hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,935 yang lebih besar dari 0,05 sehingga data menjadi layak untuk digunakan lebih lanjut.

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
	N	54
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.32198021
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.055
	Kolmogorov-Smirnov Z	.537
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.935

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data primer, data diolah tahun 2014

### 3) Hasil Uji Multikolinearitas

Pada uji multikolinearitas terlihat hasil tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi tersebut karena nilai dari *tolerance* dan VIF masing-masing menunjukkan nilai *tolerance* yang dimiliki seluruh variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang dihasilkan kurang dari 10 dan ditunjukkan dengan Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas (*Tolerance* dan *VIF*)**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	14.923	1.194		12.493	.000			
Pad	-.002	.001	-.186	-1.590	.118	.517	1.936	
perkapita	.002	.158	.002	.015	.988	.394	2.537	
pendidikan	-1.100	.186	-.688	-5.930	.000	.527	1.898	

a. Dependent Variable: kemiskinan

Sumber: Data diolah, 2014

### 4) Hasil Uji Autokorelasi

Nilai tabel Durbin Watson pada  $\alpha = 5\%$  ;  $n = 54$  ;  $k - 1 = 3$  adalah  $dL = 1,4464$  dan  $dU = 1,6800$ . Hasil pengolahan data menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,876 dan nilai tersebut berada di antara  $dU$  dan  $(4 - dU)$  atau 1,876 lebih besar dari 1,6800 dan 1,861 lebih kecil dari 2,3200. Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tersebut tidak terdapat autokorelasi atau tidak terjadi korelasi di antara kesalahan pengganggu.

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.803 <sup>a</sup>	.645	.624	1.36106	1.876

a. Predictors: (Constant), pendidikan, pad, perkapita

b. Dependent Variable: kemiskinan

Sumber : Data diolah, 2014

### 5) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas didapatkan hasil bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas model regresi dalam penelitian ini karena seluruh nilai signifikansi yang diperoleh dari pengujian dengan metode *Glejser* diperoleh nilai  $\alpha$  lebih dari 0,05 terhadap absolut residual (Abs\_Res) secara parsial, sehingga layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen sesuai dengan yang ditunjukkan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode *Glejser*)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.445	.730		1.980	.053
Pad perkapita	-.001	.001	-.295	-1.578	.121
pendidikan	.041	.096	.090	.422	.675
	-.070	.113	-.115	-.619	.539

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Data diolah, 2014

### 6) Pembahasan Hasil Penelitian

#### (1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil uji t, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hal ini di perkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Endah Wulan (2012), Budi Santoso dan Retno Puji Rahayu (2003) menemukan hubungan yang negatif antara pendapatan asli daerah dan tingkat kemiskinan, apabila pendapatan asli daerah yang tinggi maka tingkat kemiskinan akan rendah.

#### (2) Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil uji t, pendapatan perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil penelitian Resosudarmo *et al.* (2006) menyatakan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan karena dengan pendapatan perkapita tinggi yang dimiliki oleh setiap provinsi, maka akan membuat tingkat kemiskinan tersebut bisa bertambah namun tidak terlalu signifikan perubahannya. Hal ini terjadi karena pendapatan perkapita biasanya digunakan hanya untuk perbaikan infrastruktur dari daerah yang bersangkutan.

### (3) Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil uji  $t$ , tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil penelitian Thamrin (2007) menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan menunjukkan tingkat wawasan maupun pengetahuan seseorang dalam penerapan yang diperoleh untuk meningkatkan usahanya dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan faktor penentu untuk memperoleh hasil yang optimal dan pendapatan yang lebih menguntungkan.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara simultan variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan perkapita dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2006-2011. Secara parsial pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2006-2011. Namun, tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2006-2011.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan yaitu pemerintah dalam hal ini diharapkan memberikan bantuan yang lebih mengarah pada peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa mandiri, seperti bimbingan dan pelatihan tentang usaha kecil menengah dan juga bantuan modal, sehingga masyarakat dapat berusaha sendiri untuk meningkatkan pendapatan rumah tangganya.

Selain itu, kebijakan terkait perbaikan di bidang pendidikan dapat dilakukan dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah – daerah terpencil sehingga seluruh masyarakat mampu mengenyam pendidikan, sumbangan pendidikan ke masyarakat kurang mampu, atau pelatihan guru – guru sebagai tenaga pengajar yang dapat dikirim ke daerah – daerah terpencil.

#### REFERENSI

Addison, Hector. 2007. *Empirical Analysis of Poverty and Inequality in west Virginia*. Journal. [http://work.bepress.com/hector\\_addison/2](http://work.bepress.com/hector_addison/2). Diunduh 6 Desember 2013.

Akudugu, Jonas Ayaribilla. 2012. *Accountability in local Government revenue management: who does what?*. *Journal of Sustainable Development*. 2(2).

Badan Pusat Statistik. 2013. *Bali Dalam Angka 2013*. hal: 103

Badan Pusat Statistik. 2013. *Bali Dalam Angka*. Denpasar.

Budi Santosa, Purbayu dan Puji Rahayu, Retno. 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*. Vol 2. No 1. hal: 9-18.

- Cooray, Arusha. 2009. Government Expenditure, Governance and Economic Growth. [www.palgrave-journals.com/ces/](http://www.palgrave-journals.com/ces/). 51: 401-418.
- Dao, Minh Quang. 2012. Government Expenditure and Growth in Developing Countries. *Progress in Development Studies* 12. pp: 77-82.
- Endah Wulan, Titisari. 2012. *Analisis Pendidikan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Pada Era Otonomi Daerah Di Jawa Tengah Tahun 2007-2009*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Eric Neumayer. 2001. *The Human Development Index and Sustainability — a constructive proposal*. *Ecological Economics Journal* 39: h:101–114.
- Ikeji, Chibueze C. 2011. Politics of Revenue of policy and Strategic Studies, 1(1), pp: 121-136.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. *Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49. Hal : 1 – 21.
- M. Muh. Nasir, Saichudin dan Maulizar. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo*. Jurnal Eksekutif. Vol.5 No.4, Agustus 2008. Lipi. Jakarta.
- Nilsen, R. Sigurd. 2007. *Poverty in America: Consequences For Individual and The Economy*. Paper Presented for United States Government Accountability Office. Amerika Serikat: GAO.
- Norton, Seth W. 2002. *Economic Growth and Provery: In Search of Trickle Down*. *Cato Journal*, 22(2), pp: 263-275.
- Prastyo, Adit Agus. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan ( Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000-2004)*. Thesis Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Resosudarmo, BP., Vidyattama, Y., (2006). *Regional Income Disparity in Indonesia. A Panel Data Analysis*. *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 23 No. 1, April 2006. Pp 31 – 44.
- Setiyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Desember 2007, Vol. 4, No. 2, hal. 211-288.
- Sukirno, Sadono. “*Teori Pengantar Makro Ekonomi*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Undang-undang No.32 tahun 2004, "Undang-undang Otonomi Daerah", Jakarta, Fokusmedia, 2009

Vincent, Brian.2009.*The Concept'Provety' towards Understanding in The Context of Development. 2(2).*

Yogi Swara dan Jember, Made.2010. *Kemiskinan di Bali*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.